



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3781-3795  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016-2020

Affan Hidayatullah<sup>1✉</sup>, Indra Cahya Kusuma<sup>2</sup>, Farizka Susandra<sup>3</sup>  
Universitas Djuanda Bogor

Email: [affanhidayatullah22@gmail.com](mailto:affanhidayatullah22@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Bekasi dengan menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan pada Laporan Realisasi APBD Kota Bekasi. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2016-2020. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kota Bekasi dari tahun anggaran 2016-2020 rata-rata hanya sebesar 40,48% yang tergolong rendah dengan menunjukkan pola hubungan konsultatif. Rasio efektivitas PAD Kota Bekasi tahun anggaran 2016-2020 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 86,17% dari anggaran yang ditetapkan yang tergolong kurang efektif. Rasio efisiensi keuangan daerah Kota Bekasi tahun anggaran 2016-2020 rata-rata tingkat rasio sebesar 99,93% dari anggaran yang tergolong efisien. Rasio keserasian tahun anggaran 2016-2020 Kota Bekasi mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah rata-rata yaitu sebesar 77,22% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 21,84%. Rasio pertumbuhan Pendapatan daerah Kota Bekasi tahun anggaran 2016-2020 hasil rata – rata pertumbuhan sebesar 5.74%.

Kata Kunci: *Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.*

## Abstract

This study aims to determine the financial performance of the Bekasi City government by analyzing the independence ratio, PAD effectiveness ratio, efficiency ratio, harmony ratio, and growth ratio in the Bekasi City APBD realization report. The data used is the Budget Realization Report for the 2016-2020 fiscal year. Data analysis uses quantitative descriptive methods. The results showed that the Bekasi City independence ratio from the 2016-2020 fiscal year averaged only 40.48%, which was classified as low by showing a consultative relationship pattern. The Bekasi City PAD effectiveness ratio for the 2016-2020 fiscal year averaged an achievement level of 86.17% of the budget set, which was classified as less effective. The regional financial efficiency ratio of Bekasi City in the 2016-2020 budget years averaged a ratio level of 99.93% of the budget, which was classified as efficient. The compatibility ratio for the 2016-2020 fiscal year Bekasi City allocates most of its budget for regional operating expenditures on average, which is 77.22% compared to the average capital expenditure of 21.84%. The growth ratio of Bekasi City's regional revenue for the 2016-2020 fiscal year results in an average growth of 5.74%.

*Keywords: Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Concordance Ratio, Growth Ratio.*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004). Pemberian Otonomi Daerah kepada Kabupaten dan Kota tersebut menjadikan pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah, Indra dan Gatot (2002:1). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus

mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah, Mardiasmo (2013: 182).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan, Halim (2012: 230).

Sebagai Kota, Bekasi memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu: (1) PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Beberapa permasalahan keuangan daerah dihadapi Kota Bekasi antara lain: (1) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (2) Masih tingginya jumlah belanja rutin/operasi dibandingkan belanja modal daerah.

Keuangan daerah Pemerintah Kota Bekasi pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan bahwa bantuan pusat dan pinjaman yang meliputi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah Pemerintah Kota Bekasi dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan masih kurang maksimal. Pendapatan asli daerah ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, sedangkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atas, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pusat dan Pinjaman

Tahun	Pendapatan asli Daerah	Bantuan Pusat dan Pinjaman	
		Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2018	2,001,150,459,494.21	2,645,358,572,147.00	189,471,225,533.00
2019	2,442,151,873,746.89	3,329,109,212,222.00	192,671,706,540.00
2020	2,048,909,314,820.00	2,843,989,275,635.00	199,267,163,046.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 data yang diolah mengenai realisasi pendapatan asli daerah dan bantuan dari pusat dan pinjaman, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 pendapatan asli daerah mengalami penurunan, begitu pula dengan dana bantuan pusat pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Namun demikian, pada kenyataannya, dana bantuan pusat dan pinjaman dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah Kota Bekasi kurang memaksimalkan pendapatan asli daerah karena dana bantuan pusat dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi masih cukup besar, sehingga menyebabkan ketidak efektifan yang masih bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kota Bekasi harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi. Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Fenomena ini perlu dikaji, karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi

yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bekasi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

### Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan melalui perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

NO	RASIO	DEFINISI	RUMUS	KRITERIA															
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)	Halim (2012: 221) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.	$RKKD = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kemandirian (%)</th> <th>Kemampuan Keuangan</th> <th>Pola Hubungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0% - 25%</td> <td>Rendah Sekali</td> <td>Instruktif</td> </tr> <tr> <td>25% - 50%</td> <td>Rendah</td> <td>Konsultatif</td> </tr> <tr> <td>50% - 75%</td> <td>Sedang</td> <td>Partisipatif</td> </tr> <tr> <td>75% - 100%</td> <td>Tinggi</td> <td>Delegatif</td> </tr> </tbody> </table>	Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan	0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif	25% - 50%	Rendah	Konsultatif	50% - 75%	Sedang	Partisipatif	75% - 100%	Tinggi	Delegatif
Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan																	
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif																	
25% - 50%	Rendah	Konsultatif																	
50% - 75%	Sedang	Partisipatif																	
75% - 100%	Tinggi	Delegatif																	
2	Rasio Efektivitas PAD	Mardiasmo (2013: 112) Rasio efektivitas adalah kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.	$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kemampuan Keuangan</th> <th>Rasio Efektivitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat efektif</td> <td>&gt; 100</td> </tr> <tr> <td>Efektif</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cukup efektif</td> <td>90 – 99</td> </tr> <tr> <td>Kurang efektif</td> <td>75 – 89</td> </tr> <tr> <td>Tidak efektif</td> <td>&lt; 75</td> </tr> </tbody> </table>	Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)	Sangat efektif	> 100	Efektif	100	Cukup efektif	90 – 99	Kurang efektif	75 – 89	Tidak efektif	< 75			
Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)																		
Sangat efektif	> 100																		
Efektif	100																		
Cukup efektif	90 – 99																		
Kurang efektif	75 – 89																		
Tidak efektif	< 75																		

3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)	Halim (2012: 234), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan dari anggaran yang telah diterima	Rasio Efisiensi PAD = $\frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria Efisiensi</th> <th>Persentase Efisiensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% Keatas</td> <td>Tidak Efisien</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>Efisien Berimbang</td> </tr> <tr> <td>Kurang dari 100%</td> <td>Efisien</td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi	100% Keatas	Tidak Efisien	100%	Efisien Berimbang	Kurang dari 100%	Efisien
Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi											
100% Keatas	Tidak Efisien											
100%	Efisien Berimbang											
Kurang dari 100%	Efisien											
4	Rasio Keserasian	Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.  1. Belanja Operasi Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi  2. Belanja Modal Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. . Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan	1. Rasio Belanja Operasi $\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$  2. Rasio Belanja Modal $\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.								

<p>5 Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif</p> <p>Mahmudi (2010: 138).</p>	<p>Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif</p> $r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$ <p>Keterangan:  <math>r</math> = Rasio Pertumbuhan  <math>P_n</math> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n  <math>P_0</math> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)</p>	<p>Halim (2008: 241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif.</p>
--	---	---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Hasil Penelitian

#### 1.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat di lihat di Tabel 4.1:

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2016	1,607,389,410,491.40	4,225,314,416,408.40	38.04	Rendah	Konsultatif
2017	1,988,356,922,192.95	4,756,703,208,558.95	41.80	Rendah	Konsultatif

2018	2,001,150,459,494.21	4,835,980,257,174.21	41.38	Rendah	Konsultatif
2019	2,442,151,873,746.89	5,963,932,792,508.89	40.95	Rendah	Konsultatif
2020	2,048,909,314,820.00	5,092,165,753,501.00	40.24	Rendah	Konsultatif

Sumber : Data diolah (2021)

Dilihat dari tabel 4.1, maka untuk Rasio kemandirian Pemerintah Kota Bekasi yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2016 rasio kemandirian sebesar 38.04%, yang termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%, pemerintah kota Bekasi untuk tahun 2017 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 41.80%, yang juga masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%, untuk tahun 2018 sampai 2020 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 41.38%, 40.95% dan 40.24%, dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) sudah mulai berkurang. Dimana maksud dari pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah

#### 1.1.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2 Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
2016	1,607,389,410,491.40	1,686,660,486,524.00	95.30	Cukup Efektif
2017	1,988,356,922,192.95	2,352,843,540,287.02	84.51	Kurang Efektif

2018	2,001,150,459,494.21	2,493,212,141,337.00	80.26	Kurang Efektif
2019	2,442,151,873,746.89	3,346,023,558,779.00	72.99	Kurang Efektif
2020	2,048,909,314,820.00	2,095,144,151,883.00	97.79	Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah (2021)

Dapat dilihat dari tabel 4.2 rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2016 sebesar 95.30% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 90% -99%. Untuk tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84.51%, 80.26% dan 72.99% yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 75% - 89%. Sedangkan Untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 97,79%, tetapi masih termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 90% - 99%.

### 1.1.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kemampuan Keuangan
2016	4,403,530,694,024.82	4,225,314,416,408.40	104.22	Tidak efisien
2017	4,981,203,594,624.00	4,756,703,208,558.95	104.72	Tidak efisien
2018	5,000,442,687,914.14	4,835,980,257,174.21	103.40	Tidak efisien
2019	5,566,376,729,279.03	5,963,932,792,508.89	93.33	Efisien
2020	4,785,811,812,190.00	5,092,165,753,501.00	93.98	Efisien

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2016 sampai 2018 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun

2019 dan 2020 efisiensinya tergolong Efisien yaitu sebesar 93.33% dan 93.98%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

#### 1.1.4 Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4 Rasio Belanja Operasi

Tahun	Belanja operasi (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2016	2,970,470,203,283.82	4,403,530,694,024.82	67.46
2017	3,744,881,355,434.00	4,981,203,594,624.00	75.18
2018	4,219,475,858,337.17	5,000,442,687,914.14	84.38
2019	4,461,255,631,781.29	5,566,376,729,279.03	80.15
2020	3,777,484,224,403.00	4,785,811,812,190.00	78.93

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa rata rata Rasio Keserasian Belanja Operasi Kota Bekasi sebesar 77.22%. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 67.46%, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 75.18% dan 84.38%, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 80.15% dan 78.93%.

Tabel 4.5 Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2016	1,428,034,524,406.00	4,403,530,694,024.82	32.43
2017	1,236,086,622,628.00	4,981,203,594,624.00	24.82
2018	780,096,411,797.97	5,000,442,687,914.14	15.60
2019	1,104,382,128,417.74	5,566,376,729,279.03	19.84
2020	790,046,033,137.00	4,785,811,812,190.00	16.51

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa rata - rata Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Bekasi sebesar 21.84%. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 32.43%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 24.82%, dan 15.60%, Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 19.84%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 16,51%.

#### 1.1.5 Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat di lihat ditabel 4.6 Di bawah ini :

Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan

Tahun	Pendapatan	Pertumbuhan pendapatan
2016	4,225,314,416,408.40	-
2017	4,756,703,208,558.95	12.58%
2018	4,835,980,257,174.21	1.67%
2019	5,963,932,792,508.89	23.32%
2020	5,092,165,753,501.00	-14.62%
	Rata – rata	5.74%

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami peningkatan pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 23.70%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yakni hanya sebesar -16.10%. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 23.32% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -14.62%. Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 26.07%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -15.33%. Pertumbuhan Belanja Modal mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 41.57%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar -36.89%.

## 3.2. Pembahasan

### 3.2.1 Rasio Kemandirian

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kota Bekasi memiliki rata-rata kemandiriannya sebesar 40,48% masih tergolong Rendah dan dalam kategori pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 25% - 50%.

Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Bekasi sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD.

#### 1. Rasio Efektivitas PAD

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Bekasi Kurang Efektif karena rata-rata efektivitasnya berada dalam kisaran 75-89% yaitu 86,17%. Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Kota Bekasi dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Bekasi dikatakan kurang efektif dikarenakan kurangnya ketelitian dalam mentukan atau menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara riil sesuai dengan aturan yang berlaku dan kedisiplinan aparatur daerah juga sangat dibutuhkan dalam merealisasi target pendapatan asli daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Efisiensi Kinerja Keuangan Kota Bekasi tergolong Efisien karena rata-rata rasionya sebesar 99,93% karena masih dibawah 100%, meskipun pada tahun 2016 sampai 2018 total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya, namun rata rata Efisiennya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Kota Bekasi, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah Kota Bekasi mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi.

Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini masih belum mampu menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

## 3. Rasio Keserasian

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi belanja modal dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat maupun

layanan publik. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS.

Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Bekasi kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Bekasi diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Menurut uraian dan perhitungan diatas bahwa upaya pemerintah Kota Bekasi untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat, tetapi untuk tahun 2020 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yang signifikan, hal ini terjadi dikarenakan Adanya pandemi COVID-19 berakibat pada banyaknya sektor usaha yang menghentikan kegiatannya, sehingga berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, selain itu adanya kebijakan relaksasi pajak daerah selama masa pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan atas denda pajak daerah. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya pemerintah Kota Bekasi selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor PAD.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan pendapatan dari tahun 2016-2020 rata-rata rasionya sebesar 5.74%. Pada tahun 2017-2019 rasio pertumbuhannya positif namun pada tahun 2020 rasio pertumbuhannya negatif hal ini dikarenakan adanya COVID-19 pada tahun 2020, pemerintah Kota Bekasi diharapkan bisa lebih optimal lagi dalam menggali potensi-potensi PAD yang ada.

#### SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bekasi maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bekasi tahun anggaran 2016 samapai 2020 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah dan dalam kategori pola hubungan Konsultatif, karena tergolong dalam interval 25% - 50% yaitu 40,48%.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bekasi jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD Kurang Efektif karena rata-rata efektivitasnya berada dalam kisaran 75-89% yaitu 86,17%.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bekasi jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, karena rata-rata rasionya dibawah 100% yaitu sebesar 99,93%.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bekasi jika dilihat dari Rasio Keserasian masih Rendah. Pemerintah Kota Bekasi lebih memprioritaskan alokasi Belanja Operasi dengan tingkat rata-rata 77,22% dibandingkan Belanja Modal dengan tingkat rata-rata 21,84%.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kota Bekasi jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan pendapatan positif, karena rata-rata rasionya sebesar 5.74%.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2013. Perpajakan: Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No, 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000, Tentang Tarif Retribusi.
- <http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-fungsi-dan-tujuan-akuntansi.html>.
- Diakses pada tanggal 20 Juli 2020 14.00 WIB
- <http://bekasikota.go.id>
- <http://petatematikindo.wordpress.com>